



SKRIPSI

Judul:

TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI
PELAKSANA ADMINISTRASI DARI PUTUSAN PENGADILAN
YANG
SUDAH BERKEKUATAN HUKUM

Disusun oleh:

ERICO CARDOVA
NIM. 205170076

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**TANGGUNG JAWAB BADAN
PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI
PELAKSANA ADMINISTRASI DARI
PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH
BERKEKUATAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Erico Cardova
NIM. : 205170076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2024**

Pengesahan

Nama : ERICO CARDOVA
NIM : 205170076
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI PELAKSANA ADMINISTRASI DARI PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM
Title : The Responsibility of the National Land Agency as the
Executor of Administrative Execution of Legally Binding
Court Decisions

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

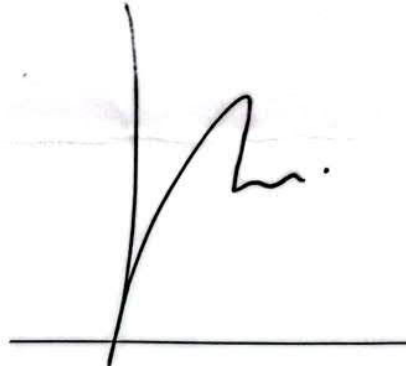
Tim Penguji:

1. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr. Prof.
2. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
3. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:

BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

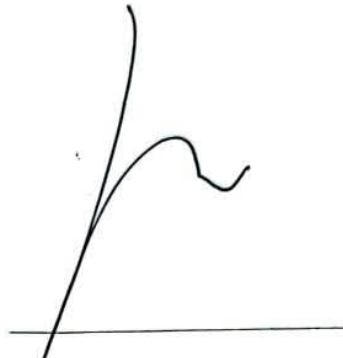
Persetujuan

Nama : ERICO CARDOVA
NIM : 205170076
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI PELAKSANA ADMINISTRASI DARI PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 22-Desember-2023

Pembimbing:
BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum.,
MKn.
NIK/NIP: 10215007

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above a horizontal line.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada pelaksanaan administrasi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan fokus pada kasus nomor 392 K/TUN/2017. Studi ini mengeksplorasi bagaimana BPN melaksanakan tindakan administratif sesuai dengan keputusan yudisial dan memeriksa aspek hukum serta pertimbangan putusan dari perspektif Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan penelitian normatif, studi ini menerapkan pendekatan undang-undang dan kasus untuk memahami secara mendalam implikasi hukum dari tanggung jawab administratif BPN. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa BPN memegang peran penting dalam eksekusi tindakan administratif yang berkaitan dengan pendaftaran tanah sesuai dengan keputusan pengadilan. Hal ini menekankan pentingnya penerapan prosedur hukum dan prinsip administratif yang benar untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah kesalahan administratif dalam pendaftaran tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa tindakan BPN harus selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi hukum yang berlaku, sehingga menjaga kepastian hukum dan menghindari kesalahan administratif dalam pendaftaran tanah.

Kata kunci : Badan Pertanahan Nasional, Eksekusi Hukum,
Putusan Pengadilan, Administrasi Pertanahan.

ABSTRACT

This research examines the role and responsibility of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional - BPN) in the administrative execution of legally binding court decisions, focusing on case number 392 K/TUN/2017. It explores how BPN implements administrative actions following judicial rulings and examines the legal aspects and considerations of the decision from the perspectives of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960 and the Administration Law No. 30 of 2014. Using a normative research approach, the study employs statutory and case approaches to deeply understand the legal implications of BPN's administrative responsibilities. The findings indicate that BPN plays a crucial role in executing administrative actions related to land registration as mandated by court decisions. It highlights the importance of adhering to proper legal procedures and administrative principles to ensure legal certainty and prevent administrative flaws in land registration. The study concludes that BPN's actions must align with the principles of good governance and legal regulations, thereby maintaining legal certainty and avoiding administrative errors in land registration.

Keywords : National Land Agency, Legal Execution, Court Decision, Land Administration.

Pernyataan

Nama : ERICO CARDOVA
NIM : 205170076
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI PELAKSANA ADMINISTRASI DARI PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023
Yang menyatakan



ERICO CARDOVA
NIM. 205170076

Pernyataan

Nama : ERICO CARDOVA
NIM : 205170076
Program Studi : HUKUM
Judul : TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEBAGAI PELAKSANA ADMINISTRASI DARI PUTUSAN
PENGADILAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22-Desember-2023
Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features a portrait of a man and the text '10.000', 'METRIS', 'TEMPER', and '107EFAK15507436'.

ERICO CARDOVA
NIM. 205170076

- e. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., M.H. M.Kn selaku Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini;
- f. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- g. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
- h. Kedua orang tua penulis Pio Marta dan Bapak Abdon yang telah melahirkan peneliti dan membimbing peneliti dari awal peneliti hadir di dunia ini hingga saat ini yang senantiasa pula memberikan doa, semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga.
- i. Keluarga yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga.
- j. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan tenaga, dan pikiran dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan, serta memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada peneliti.
- k. Para Narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi ini;

1. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan penulisan ini;

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 5 December 2023

Erico Cardova

DAFTAR ISI

Cover Luar	i
Cover Dalam	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Lembar Pernyataan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1) Tujuan Penelitian	10
2) Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
4. Pendekatan Penelitian	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kewenangan	28

B. Teori Pendaftaran Tanah.....	30
C. Teori Peralihan Hak Atas Tanah.....	39
D. Teori Tanggung Jawab.....	43

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	49
1. Para Pihak	49
2. Duduk Perkara.....	49
3. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 88/G/2016/PTUN-BDG	51
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung nomor 88/G/2016/PTUN-BDG	58
5. Pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 15/B/2017/PT.TUN.JKT	59
6. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/B/2017/PT.TUN.JKT	63
7. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	52
8. Putusan Mahkamah Agung	54
B. Hasil Wawancara	57
1. Muhammad Yusuf / Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang.	67
2. Dr. Suparjo Sujadi, S.H., M.H. / Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.....	71

BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN

A. Tanggung jawab Badan Pertahanan Nasional sebagai pelaksana administrasi dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum.....	74
B. Aspek hukum dan pertimbangan dalam putusan hakim perkara Nomor 392 K/TUN/2017 dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	101
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
Daftar Pustaka	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	Surat Tugas Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	Persentase Turnitin Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Lampiran 7	Surat Keterangan Wawancara Akademisi
Lampiran 8	Surat Keterangan Letter of Acceptance Sinta 4
Lampiran 9	Lembar Jurnal
Lampiran 10	Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor : 88/G/2016/PTUN-BDG
Lampiran 11	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/B/2017/PT.TUN.JKT
Lampiran 12	Putusan Pengadilan Kasasi Nomor : 392 K/TUN/2017.